

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANGERANG
TAHUN 2019-2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada urusan Persandian, Statistik dan Urusan Komunikasi dan informatika memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah. Bahwa Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Informasi menjadi suatu komoditi yang sangat berharga bagi suatu daerah untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk pemerintah daerah) secara berkelanjutan di era globalisasi.

Pemerintah Kota Tangerang telah memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi untuk menunjang pelayanan publik dengan mengembangkan *e-government* agar informasi dan layanan publik dan pemerintahan dapat secara mudah diakses secara *online*. Beberapa capaian selama ini telah dihasilkan, namun terdapat beberapa permasalahan/kendala dan tantangan yang harus dihadapi, sehingga perlu merencanakan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan informasi di Kota Tangerang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang perubahan kearah perbaikan bukan saja untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensinya programnya saja tetapi lebih jauh untuk meningkatkan eksistensinya di dalam lingkungan perubahan yang cepat dengan persaingan global yang sangat ketat, oleh karena itu perlu selalu dilakukan penataan dan penyempurnaan tata laksana di bidang informasi dan komunikasi untuk menciptakan birokrasi yang kuat, efektif dan berdaya teknologi tinggi. Perencanaan Strategis (Renstra) menjadi kebutuhan nyata bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan

serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023. Hal ini sekaligus menjalankan amanat Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kota Tangerang; (3) Verifikasi

Rancangan Renstra dengan rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan rancangan akhir Renstra yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD; dan (5) Verifikasi kesesuaian Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD. Penyusunan Renstra memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tangerang; Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2015-2019, Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten; Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tanggal 20 Maret 2012.

Renstra Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang tahun 2019-2023 akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahunan selama lima tahun mendatang. Renstra selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan seluruh aparatur dapat mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang tahun 2019-2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah TK. II Tangerang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang;

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang tahun 2019-2023 adalah sebagai pedoman untuk acuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang mengacu kepada RPJMD Kota Tangerang dan akan menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD. Renstra ini memuat ketentuan tatalaksana Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang agar lebih memerankan fungsinya dalam memberikan Komunikasi dan Informatika pembangunan kepada masyarakat.

Berdasarkan maksud di atas, maka penyusunan Rancangan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang tahun 2019-2023 bertujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2019-2023;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2019-2023;

3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bidang informasi dan komunikasi baik tahunan maupun lima tahunan pada periode 2019-2023;
4. Sebagai dasar demi tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian ini ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, telaah visi, misi, dan penentuan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini ini menguraikan tentang penjelasan/uraian tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan dilengkapi oleh indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Bagian ini menguraikan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini memuat harapan, terhadap hasil yang diinginkan serta kaidah pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas urusan Komunikasi dan Informatika, disusun berdasarkan kewenangan urusan yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terkait dengan kewenangan urusan tersebut Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kedudukan susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Susunan Organisasi Dinas adalah:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Sarana dan Prasarana TIK, dan Persandian membawahkan:
 - a. Seksi Infrastruktur Internet dan Data Center;
 - b. Seksi Tata Kelola TIK;
 - c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
4. Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK, membawahkan:
 - a. Seksi Survey dan Akuisisi Data;
 - b. Seksi Pengolahan dan Publikasi Data dan Statistik; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan TIK.
5. Bidang Pengembangan eGovernment, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Manajemen Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Layanan Publik; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi.
6. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
 - a. Seksi Diseminasi Informasi Media Elektronik;
 - b. Seksi Diseminasi Informasi Media Cetak; dan
 - c. Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik.
7. UPT Pengelola Ruang Kendali Kota.
8. UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat, Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang persandian;

3. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang statistik;
4. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian;
6. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik;
7. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
8. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang persandian;
9. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik;
10. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
11. pengelolaan UPT; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penatausahaan urusan umum;
- b. penatausahaan urusan keuangan;
- c. penatausahaan urusan kepegawaian;
- d. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas; dan
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Bidang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Persandian

Bidang Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Persandian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang sarana dan prasarana TIK dan persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan infrastruktur internet dan *data center*;
 - b. penyelenggaraan tata kelola TIK; dan
 - c. penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian.
3. Bidang Pengembangan eGovernment dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pengembangan eGovernment mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di Bidang Pengembangan Aplikasi eGovernment.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan eGovernment mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengembangan dan integrasi aplikasi manajemen pemerintahan;
 - b. penyelenggaraan pengembangan dan integrasi aplikasi layanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan pemeliharaan dan implementasi aplikasi.
4. Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang statistik dan pemberdayaan TIK.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan survey dan akuisisi data;
 - b. penyelenggaraan pengolahan dan publikasi data dan statistik; dan
 - c. penyelenggaraan pemberdayaan TIK
5. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik dan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan diseminasi informasi media elektronik;
 - b. penyelenggaraan diseminasi informasi media cetak; dan
 - c. penyelenggaraan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- a. UPT Pengelola Ruang Kendali Kota;
 - b. UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

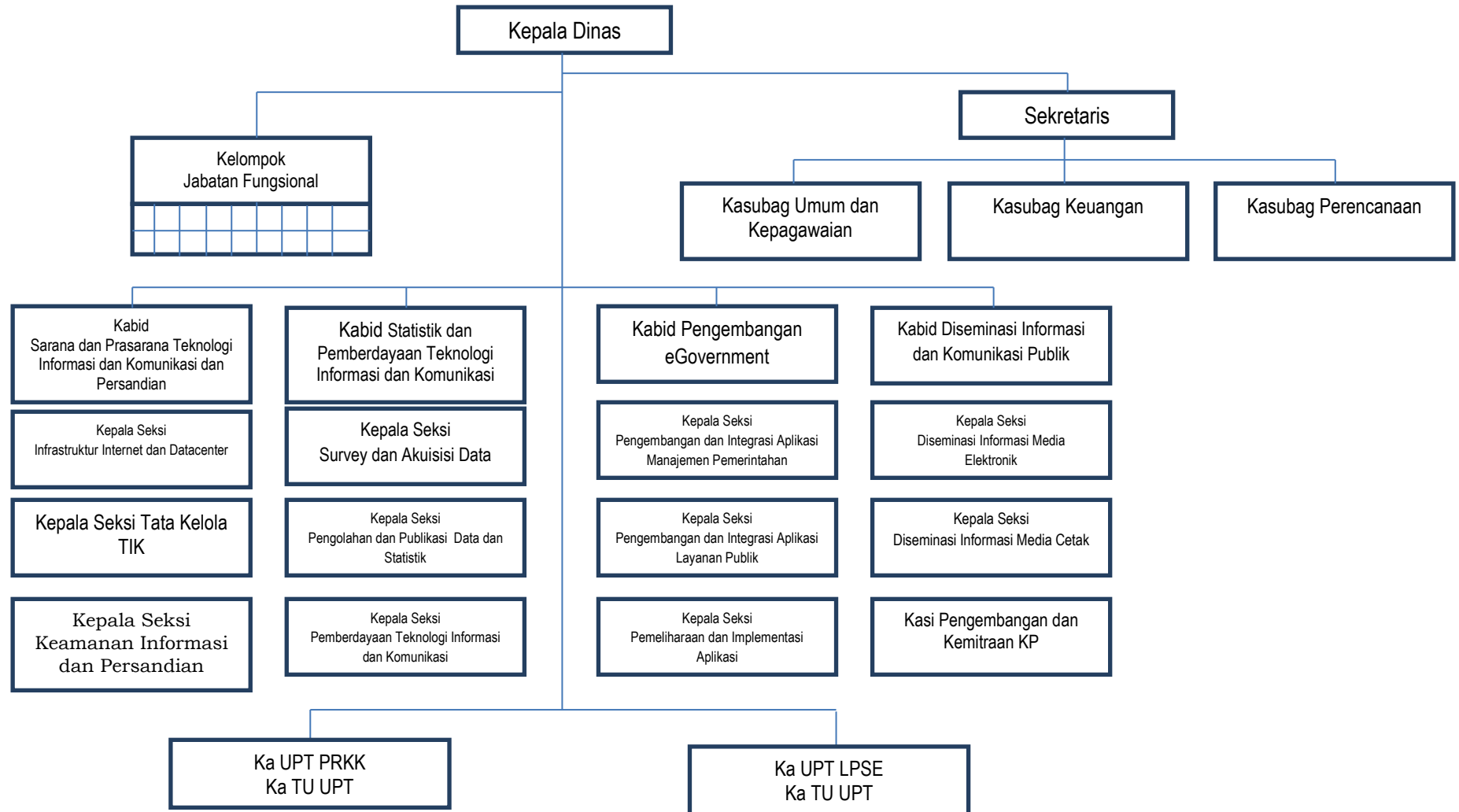
2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, ditindaklanjuti Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsinya serta tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika. adalah sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2019

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

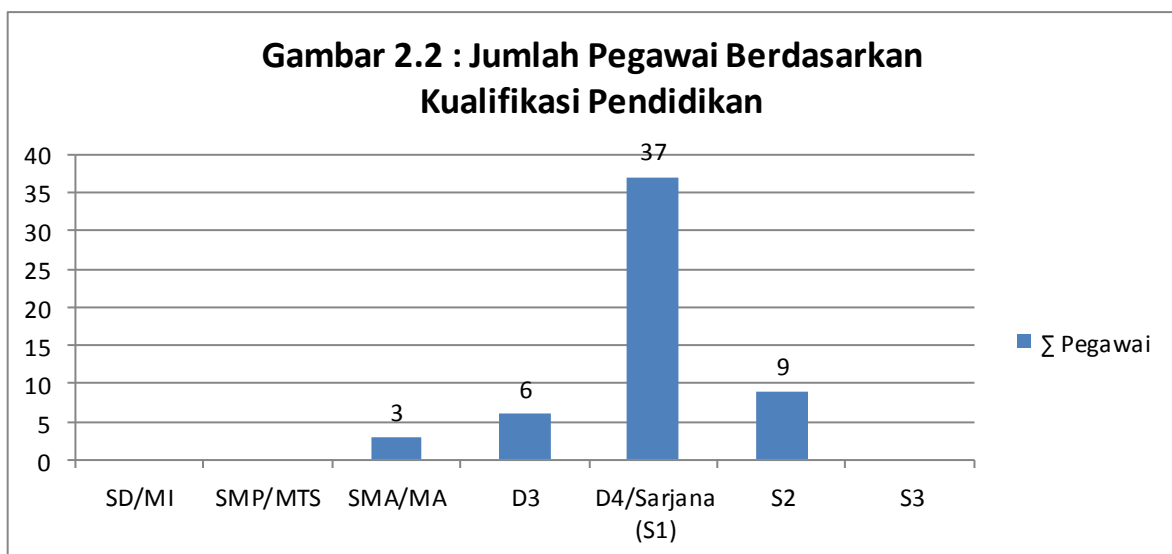


2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan sumber daya asset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

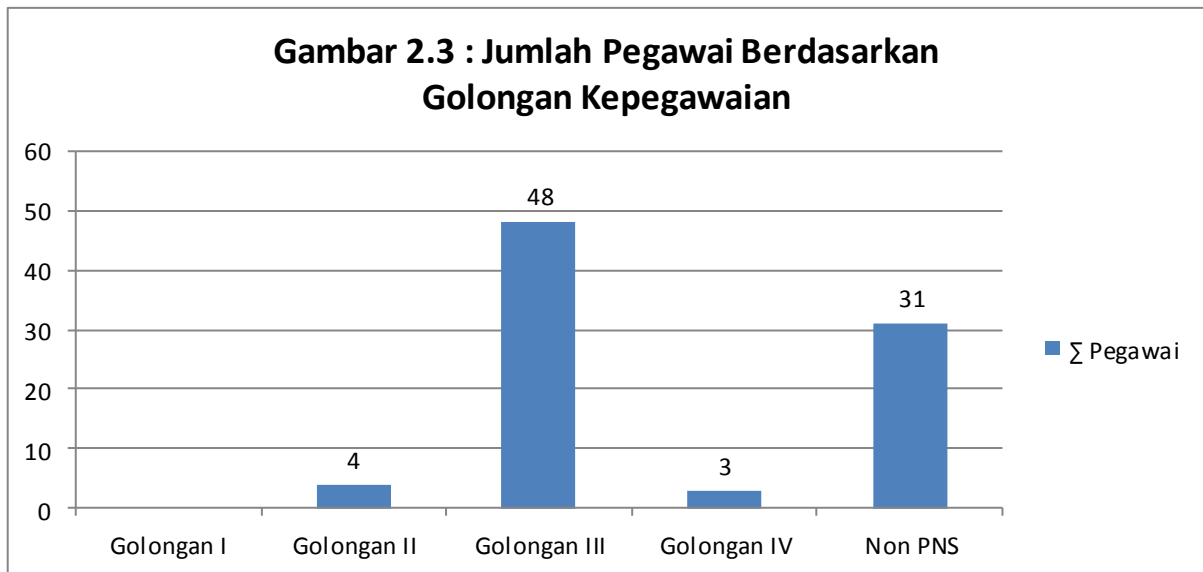
2.2.1 Sumber Daya Pegawai

Jumlah sumber daya pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang sampai pada tahun 2019 bulan Juni sebanyak 55 orang. Dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai, paling tinggi sumber daya pegawai Dinas Komunikasi dan Informatik Kota Tangerang adalah S2 sebanyak 9 orang dan Sarjana (S1)/D4 yaitu sebanyak 37 orang, D3 sebanyak 6 orang dan tingkat pendidikan setara SLTA sebanyak 3 orang, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kominfo bulan Juni 2019

Sementara itu dilihat dari golongan kepegawaian, pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu golongan II sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 48 orang, sedangkan Golongan IV sebanyak 3 orang sedangkan yang berstatus non PNS sebanyak 31 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kominfo bulan Juni 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Perkembangan Komunikasi dan Informatika di Kota Tangerang

Penggunaan teknologi informasi (seperti: wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya disebut *e-governance*.

Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan.

Pengembangan *e-government* di suatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama, meliputi :

1. Supra struktur *e-government* yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (*e-leadership*), sumberdaya manusia (*human resources*) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government (*regulation*),

2. Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan,
3. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi data (*data sharing*), dan sistem pengamanannya,
4. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (*interface*), dan aplikasi *back office*.

Dalam rangka melayani kebutuhan akan data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di Kota Tangerang yang meliputi seluruh aktivitas pembangunan, sumber daya dan kelembagaan serta data administrasi, termasuk informasi yang terkini (*up to date*) mengenai peraturan pemerintah daerah yang berlaku di Kota Tangerang.

Data tersebut tersedia dalam media elektronik yang dapat diakses melalui beberapa aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Sampai dengan 2018 sebanyak 150 aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk terus meningkatkan pelayanan publik, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merubah paradigma masyarakat yang dahulu untuk mengurus kebutuhan layanan publik masih secara konvensional, saat ini sudah beralih dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi. Pembangunan aplikasi Tangerang Live adalah salah satu wujud untuk merubah paradigma masyarakat tersebut.

Dengan memanfaatkan aplikasi Tangerang Live, masyarakat dapat mengurus beberapa layanan publik secara online, mulai dari layanan pengaduan melalui aplikasi Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda (LAKSA), Layanan darurat 112, Layanan informasi (*e-News*, *e-Paper*, event kota, JDIH, kampung kita), Layanan pariwisata (*e-Plesiran*), Layanan ketenagakerjaan (lowongan kerja, daftar kartu kuning, dan job fair), Layanan transportasi (*e-Transport*), Layanan pendidikan (pindah sekolah), Layanan kependudukan (cek NIK, cek status KTP elektronik, cek akta lahir, cek kartu keluarga, akta kelahiran, status pendaftaran akta kelahiran), Layanan kesehatan (Simpati RS, ambulan gratis, layanan 119, informasi

fasilitas RSUD), Layanan perizinan, Layanan kesra (Ayo zakat, Sabakota), Layanan ekonomi (informasi harga pasar, PBB, dan PDAM), Layanan statistik (KTDA, KCDA dan PDRB), Layanan lingkungan (Monikur, Monikar, dan Dokuling), Layanan streaming (live streaming dan video publikasi), dan Layanan antrian online.



Gambar 2.4

Menu/Fitur Aplikasi Tangerang LIVE

Untuk layanan perizinan, saat ini sebanyak 123 jenis ijin yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara online. Layanan pengaduan melalui aplikasi LAKSA akan secara cepat direspon oleh petugas yang ada di ruang pusat kendali kota (*command center*) untuk diteruskan kepada petugas yang ada dilapangan dengan memilih topik pengaduan.

Penerapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) di Pemerintah Kota Tangerang telah diterapkan mulai dari Perencanaan (*e-Planning*), penganggaran (*e-budgeting*), Pengadaan barang dan jasa (*e-Procurement*), Monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja pegawai (*e-Kinerja*), dan Pengawasan (*e-Audit*).

Menindaklanjuti rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berdasarkan kepada Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 800/Kep.506-INSPEKTORAT/2016 tentang Penetapan Rencana Aksi

Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Tangerang, bahwa aplikasi manajemen pemerintahan yang ada di Kota Tangerang harus dilakukan pengintegrasian. Selama tahun 2016-2018 telah terintegrasi aplikasi manajemen pemerintahan sebanyak 42 aplikasi, diantaranya aplikasi perencanaan kota (e-Planning), aplikasi pengelolaan keuangan daerah (e-budgeting), aplikasi pelaksanaan dan penyerapan kegiatan, aplikasi pengawasan dan monitoring, aplikasi pengukur kinerja pegawai.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Teknologi Komunikasi dan Informatika perlu terus di *upgrade* agar tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, maka diperlukan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Tangerang. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan peningkatan Pengetahuan aparatur Pemda bidang TIK dengan cara pengiriman pegawai untuk dilakukan pendidikan dan pelatihan dibidang TIK bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementrian Kominfo.

Seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informatika yang dapat dimanfaatkan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Tangerang, perlu adanya pendampingan sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal antara lain dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Situs Informasi Layanan Publik Kepada Perangkat Daerah, Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK, Bimtek/Workshop TIK Kepada Masyarakat Kota Tangerang, dan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat.

Tingkat ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD, di tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100%, berupa terkoneksi akses internet link utama dan link backup pada Data Center Kominfo yang diperuntukan untuk akses server dan jaringan di beberapa OPD dan ruang rapat yang berada dilingkungan gedung pusat pemerintahan Kota Tangerang, seperti Dinas Kominfo, BPKD, Sekretariat Daerah, Ruang Walikota dan Wakil Walikota, Ruang Akhlaqul Karimah, Ruang Al-Amanah,

Ruang Ar-Roudhoh, dan Ruang Rapat Asisten. Capaian kinerja tersebut didukung oleh 2 (dua) Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN WAN dan Kegiatan Pengadaan Akses Internet.

Penyebarluasan informasi mengenai semua aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Tangerang kepada masyarakat di tahun 2018 berupa terpublikasinya informasi pembangunan kota dan rangkaian kegiatan pada OPD melalui media website (website OPD dan website tangerangkota), kanal YouTube Tangerang TV, Pencetakan dan pendistribusian media koran mingguan Kota Benteng, Buletin Jumat sampai dengan tingkat RT, serta Majalah LIVE yang didistribusikan ke beberapa Hotel-Hotel yang ada di Kota Tangerang. Penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media luar ruang, baligho, spanduk, folder, leaflet, mobil wawaran keliling dan pameran.

Untuk urusan statistik, upaya yang telah dilakukan adalah penyusunan buku KTDA, KCDA, PDRB, pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Statistik Daerah (SISTAD), dan pembuatan infografis terkait pemerintahan dan layanan publik.

Urusan persandian capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% dengan keluaran berupa pengamanan terhadap aplikasi milik Pemda dengan menggunakan Secure Socket Layer (SSL) dan Firewall.

Dalam mengimplementasikan kebijakan penerapan TIK di Kota Tangerang, maka harus ada regulasi yang terus diperbaharui agar ada perlindungan hukum dalam mengimplementasikan kebijakan TIK. Adapun yang telah dilakukan adalah dengan menyusun regulasi TIK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola TIK.

Perkembangan teknologi informatika di samping memberikan manfaat kepada masyarakat, memiliki peluang terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut untuk kepentingan kelompok atau perorangan. Guna meminimalisir tingkat pelanggaran di bidang komunikasi dan informasi maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang antara lain dengan melaksanakan sosialisasi terhadap para pengguna (*User*).

2.3.2 Kinerja Pencapaian Indikator

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja beberapa indikator yang diamanatkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK-PPD), Standar Pelayanan Minimal (SPM), atau indikator lainnya seperti MGG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja seluruh indikator tersebut dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase publikasi data statistik daerah berbasis aplikasi	-	-	-	-	-	40,00	60,00	100	-	-	40,00	60,00	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penggunaan persandian untuk pengamanan aplikasi	-	-	-	-	-	20,00	71,00	100	-	-	31,10	80,00	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penyediaan jenis perijinan online	-	-	-	5,00	30,00	45,00	71,00	100	18,00	30,00	54,01	80,00	100	100	100	100	100	100
4	Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	-	-	-	8,00	25,00	45,00	85,00	100	10,00	25,00	51,00	86,67	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesenjangan pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat diketahui dari hasil capaian yang selalu memuat target. Dari 4 pelayanan yang termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2014-2018 semuanya telah tercapai. Hal ini terwujud karena adanya dukungan SDM dan anggaran yang mendukung tercapainya pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selain faktor pendukung terdapat aspek keuangan yang sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan capaian indikator mengingat operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	723.635.000	1.299.208.494	2.246.145.000	1.731.669.000	3.970.100.700	635.984.162	919.720.482	2.242.486.750	1.513.375.599	3.175.382.541
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.288.519.000	1.493.649.890	3.855.939.878,04	2.872.129.450	4.623.853.796	723.138.500	1.140.024.000	874.435.000	2.100.633.572	2.664.625.937
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0		64.300.000	0	64.595.000	0	0	170.000	0	63.990.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	33.320.000	79.266.000	159.572.000	0	83.063.000	30.480.000	47.766.000	87.092.000	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	309.200.000	658.086.000	6.070.000	8.000.000	8.800.00	271.865.000	493.564.000	4.770.000	8.000.000	8.800.000
Program Pengembangan Data/Informasi	0	0	0	21.940.000	0	0	0	0	21.340.000	0
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	7.417.579.450	10.207.559.505	8.388.530.575,96	10.326.871.768	14.733.899.294	6.163.213.069	7.305.099.926	4.521.489.547	9.674.132.460	11.359.435.872
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	203.590.000	1.065.738.000	40.472.000	0	526.300.000	130.397.000	656.191.330	38.122.000	0	516.375.000
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	942.562.000	670.518.000	344.055.000	475.749.900	1.022.725.800	459.874.046	477.299.000	323.135.000	438.739.400	970.756.800
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	3.731.806.800	4.892.408.001	4.333.002.000	4.673.091.500	6.004.369.000	3.275.350.200	4.093.800.850	3.327.245.600	4.443.616.600	5.802.594.700
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	0	0	0	586.140.000	1.415.650.000	0	0	0	578.415.000	1.272.202.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Persandian	0	0	0	150.000.000	493.262.500	0	0	0	132.232.680	427.405.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	18.286.000	20.114.600	0	0	0	18.286.000	20.093.600

Dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata belanja Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 tahun terakhir, dengan rata-rata ratio antara realisasi dan anggaran diatas 80%. Hal ini didukung oleh kemampuan SDM yang memadai, kerjasama dan komunikasi diinternal SKPD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugasnya untuk lima tahun kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika akan menghadapi baik tantangan maupun peluang sebagai berikut :

Tantangan :

1. Distribusi sistem aplikasi dalam menerapkan e-Government;
2. Pengembangan aplikasi manajemen pemerintahan dan layanan publik secara terintegrasi;
3. Jaminan keamanan sistem TIK;
4. Kesenjangan kemampuan TIK pada masyarakat.

Beberapa kondisi yang menjadi peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Komitmen tinggi dalam penerapan sistem pelayanan digital (*e-government*) dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten, maupun pemerintah pusat. Hal ini menjadi peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan jaringan media informasi dan komunikasi untuk masyarakat secara merata;
2. Kebijakan pengembangan *smart city* di Kota Tangerang, memberikan peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melayani masyarakat lebih optimal agar memiliki kemudahan dalam mengakses fasilitas informasi komunikasi berbasis IT;
3. Tingginya animo masyarakat Kota Tangerang dalam menggunakan media informasi dan komunikasi internet. Hal ini menjadi peluang bagi

- pemerintah daerah untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tangerang;
4. Kedekatan lokasi Kota Tangerang dengan Ibu kota Jakarta. Hal ini mendorong kemudahan akses terhadap perkembangan teknologi dan informatika di Kota Tangerang.

Selain itu, untuk pengembangan pelayanan SKPD, juga perlu dilakukan analisis/telaahan terhadap dokumen lain yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya.

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel komparasi sasaran Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Komparasi sasaran Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Diskominfo Kota Tangerang	Sasaran pada Renstra Diskominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten	Sasaran pada Renstra Kemenkominfo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase data statistik daerah kota	Meningkatkan publikasi statistik daerah dengan penggunaan aplikasi	Meningkatnya Diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	1. e-Government 2. Keterbukaan informasi publik
2	Persentase penggunaan aplikasi	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	
3	Persentase pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang digunakan oleh Pemkot			
4	Persentase pemanfaatan regulasi TIK			
5	Persentase pemanfaatan dan pengamanan infrastruktur TIK			

2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Proses penelaahan rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra SKPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kota Tangerang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, dalam RTRW berperan pada strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yakni :

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan;
2. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet khususnya pada area ruang publik.

Tabel 2.4
Hasil telaahan struktur ruang wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD	Arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan jaringan kabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan jaringan akses internet <i>fiber optic</i>	Kewenangan dalam menangani TIK dan telekomunikasi	Kota Tangerang
2	Pengembangan sistem akses internet ruang publik	Telah ada akses internet ruang publik, namun masih hanya beberapa titik akses yang dapat terjangkau serta kecepatan bandwidth yang masih sangat kecil	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah	Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kota Tangerang

2.4.3 Analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Program kota yang diturunkan menjadi program SKPD dalam Renstra SKPD telah dianalisis dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap rancangan awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang yang telah disyahkan menjadi Perda. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni pengembangan sistem informasi monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi pelayanan (Aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) yang dilaksanakan melalui program pengembangan komunikasi informasi dan media massa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak;
2. Belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha secara elektronik;
3. Belum optimalnya bimbingan teknis tata cara penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang sudah terbangun atau dikembangkan;
4. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cepat, tepat dan mudah diakses;
5. Belum optimalnya integrasi aplikasi/sistem informasi layanan aparatur dan layanan publik berbasis *web*;
6. Kurangnya sarana dan prasarana kantor terutama yang mendukung bagi kegiatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Belum optimalnya aparatur dalam memanfaatkan aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan

- administrasi perkantoran melalui jaringan *Local Area Network (LAN)* maupun internet;
8. Belum optimalnya pengelolaan sistem *database* Kota Tangerang yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang dapat di akses oleh pihak-pihak yang membutuhkan;
 9. Belum optimalnya kondisi infrastruktur teknologi informatika untuk mendukung pelayanan elektronik kepada pengambil kebijakan;
 10. Rendahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan;
 11. Kurang optimalnya sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatasi pelanggaran dan penyalahgunaan dalam penggunaan aplikasi elektronik dan kerusakan jaringan di Kota Tangerang;
 12. Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam Bidang teknologi dan informasi untuk mendukung pengembangan *e-government*;
 13. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan multimedia center pada lokasi-lokasi tertentu (jaringan LAN/WAN);
 14. Belum adanya hubungan dan kerjasama bidang pengembangan telematika dengan kota-kota yang sudah menerapkan teknologi informatika dan komunikasi secara maksimal;
 15. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Pengadaan secara Elektronik;
 16. Belum terstandarnya layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 17. Belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung terlaksananya tertib penggunaan media informasi dan komunikasi elektronik;
 18. Belum terpenuhinya sarana prasarana, sumber daya manusia serta *software* dan *hardware* Teknologi informatika (TI) sesuai dengan *Masterplan* Teknologi informatika yang telah ada.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Kewenangan diluar SKPD)	
Partisipasi Stakeholder dalam hal Informasi & Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan layanan pengaduan belum dapat terselesaikan secara cepat 2. Kebutuhan akan data dari beberapa SKPD masih terkadang sangat sulit didapatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat ketepatan waktu dalam menyelesaikan jawaban tiap layanan pengaduan 2. Usulan kebutuhan data 	Kapasitas kelembagaan dan aparatur	Tingkat kepedulian masyarakat rendah	Pelaksanaan layanan pengaduan belum maksimal
Integrasi aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 2. Integrasi dan Interportabilitas; 3. Tersedianya atau dukungan Regulasi Integrasi aplikasi dan Rencana Induk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi dan Interoperabilitas antar aplikasi; 2. Regulasi Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas kelembagaan sebagai Chief Of Information Officer (CIO); 2. Regulator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 	<i>E-Leadership</i> pejabat daerah dalam implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya aplikasi yang belum dapat terintegrasi, dikarenakan pengelolaan dikelola oleh vendor; 2. Lemahnya koordinasi teknis dengan vendor sebagai pemilik aplikasi yang belum dapat terintegrasi
Pengelolaan data dan Website	Pengelolaan, Akurasi dan validasi <i>update website</i> belum maksimal.	Pengelolaan, pendampingan dan evaluasi informasi <i>website</i> .	Jumlah aparatur atau administrator dan penulis terbatas.	Koordinasi dan kerjasama antar SKPD	Ketersediaan dan Tingkat akurasi penulisan.
Kapasitas SDM TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakmerataan jumlah SDM TIK; 2. Kompetensi berbasis TIK kurang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pendidikan berbasis TIK; 2. Kemampuan TIK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM TIK; 2. Kesempatan Diklat/bintek TIK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan pegawai kewenangan BKPSDM; 2. Kesesuaian diklat. 	Kapasitas aparatur SDM TIK
Tatakelola Kelembagaan TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan & pelaporan keuangan belum optimal; 2. Tingkat kedisiplinan aparatur; 3. Ketersediaan SOP Infrastruktur dan Aplikasi TIK; 4. Ketersediaan standar sarana dan prasarana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan; 2. Absensi pegawai; 3. Realisasi anggaran; 4. Surat Keputusan SOP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan disiplin pegawai; 2. Tatakelola Infrastruktur dan Aplikasi TIK 	Peran bagian Organisasi dan Tata Kelola dalam pendampingan	Sarana dan prasarana

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi Walikota Tangerang, yaitu sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera Berakhlaqul Karimah dan Berdaya Saing”

Penjabaran dari Visi Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

a. Kota Tangerang Sejahtera

Kota Tangerang yang sejahtera tentu menjadi harapan dan cita-cita dari semua masyarakat. Kehidupan yang baik itu akan menumbuhkan nilai, derajat dan martabat hidup seseorang. Jika masyarakatnya sejahtera tatanan kehidupan manusia pun akan semakin baik dan berkualitas. Dan jika rakyat sejahtera maka masyarakat tidak lagi menjadi objek tapi subjek yang menerima kehidupan yang makmur dan berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945;

b. Kota Tangerang Berakhlaqul Karimah

Akhlaqul Karimah adalah simbol dari masyarakat Kota Tangerang. Aspek ini bersumber dari sikap dan prilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antara manusia dengan tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri. Akhlak mulia menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengalaman agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan madaniyyah

dan hidup menuju negeri yang baldatun toyibatun warobun ghafur.

c. Kota Tangerang Berdaya Saing

Kota berdaya saing adalah kemampuan kota yang unggul dalam berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Dalam membangun kota, dibutuhkan banyak sumber daya diantaranya sumber daya alam, energi, manusia, sosial, keuangan, dan teknologi. Sedangkan ketersediaan sumber daya merupakan suatu yang langka dan harus diperjuangkan. Oleh karena itu, suatu kota diharapkan mampu berkompetisi dan bersaing dalam memenuhi sumber daya yang dibutuhkan. Mulai dari mengenali kemampuan kekurangan dan kelebihan untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada. Sehingga, kota memiliki kemampuan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan untuk merebutkan ketersediaan sumber daya yang langka tersebut dengan efektif dan efisien.

2. Misi

Secara umum, Misi dapat diartikan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pada rumusan Visi Kota Tangerang 2019-2023 tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Bersama membangun kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas;
- b. Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- c. Bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang

informasi dan komunikasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian Misi ke-1 yaitu Bersama membangun kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Keterkaitan antara misi Kota Tangerang dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi dan Misi Kota Tangerang
dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Misi ke-1 Bersama membangun kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong terwujudnya sistem kinerja administrasi dan koordinasi pemerintahan yang optimal melalui dukungan teknologi informatika dan komunikasi. b. Perumusan kebijakan teknis urusan informasi dan komunikasi; c. Penyelenggaraan pengendalian dan operasional informasi dan komunikasi; d. Pelaksanaan tugas teknis pengolahan data dan pengembangan multi media; e. Pelaksanaan pemberian pelayanan Komunikasi dan Informatika pembangunan kepada masyarakat; f. Pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan; g. Pengoordinasian lintas sektor; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke-1 dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke-1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Misi, Permasalahan Layanan Dinas Kominfo dan Faktor Penghambat maupun Pendorong

Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi ke-1 Bersama membangun kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak 2. Belum optimalnya pengelolaan website Kota Tangerang, <i>e-mail</i> resmi, <i>Call Center</i> sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha secara elektronik 3. Belum optimalnya bimbingan teknis tata cara penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang sudah terbangun atau dikembangkan 4. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan sarana Teknologi Informasi dan komunikasi yang cepat, tepat dan mudah diakses 5. Belum optimalnya integrasi aplikasi/sistem informasi layanan aparatur dan layanan publik berbasis <i>web</i> 6. Kurangnya sarana dan prasarana kantor terutama yang mendukung kegiatan penerapan teknologi informatika dan komunikasi. 7. Belum optimalnya aparatur dalam memanfaatkan aplikasi yang sudah dibangun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kesiapan SDM untuk penerapan TIK pada seluruh tatanan instansi pemerintah Kota Tangerang. 2. Masih lemahnya kebijakan penerapan TIK untuk seluruh komponen instansi pemerintah di Kota Tangerang. 3. Prasarana untuk pengembangan TIK masih terbatas di masing-masing SKPD; 4. Belum optimalnya kesadaran informasi yang dimiliki masyarakat dalam penggunaan TIK. 5. Penggunaan teknologi informatika dan komunikasi belum merata dan luasannya masih terbatas. 6. Harga perangkat pengembangan TIK masih relatif mahal. 7. Belum adanya perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM apartaur yang memadai untuk dikembangkan dalam penerapan TIK. 2. Dukungan finansial baik melalui APBD Kota, Provinsi maupun melalui pendanaan nasional. 3. Pada sebagian wilayah sudah terbangun infrastruktur jaringan TIK. 4. Tren era globalisasi yang tidak dapat ditolak. 5. Perkembangan layanan internet semakin meluas di masyarakat. 6. TIK mempermudah dalam menyampaikan berbagai informasi penyelenggara n pemerintahan kepada masyarakat.

Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>dan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran melalui jaringan <i>Local Area Network (LAN)</i>, maupun internet</p> <p>8. Belum optimalnya pengelolaan sistem <i>database</i> Kota Tangerang yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang dapat di akses oleh pihak-pihak yang membutuhkan.</p> <p>9. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jaringan media informasi dan komunikasi untuk masyarakat.</p> <p>10. Belum optimalnya kondisi infrastruktur teknologi informatika untuk mendukung pelayanan elektronik kepada pengambil kebijakan.</p> <p>11. Rendahnya Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Di Tingkat Kecamatan.</p> <p>12. Kurang optimalnya sistem pengawasan berbasis teknologi informatika dan komunikasi (IT) untuk mengatasi pelanggaran dan penyalahgunaan dalam penggunaan aplikasi elektronik dan kerusakan jaringan di Kota Tangerang.</p> <p>13. Belum optimalnya pelayanan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat secara <i>Online</i>.</p> <p>14. Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah</p>	<p>yang memadai dalam pengembangan TIK.</p>	

Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>daerah dalam Bidang teknologi dan informasi untuk mendukung pengembangan <i>e-government</i>.</p> <p>15. Belum adanya hubungan dan kerjasama bidang pengembangan telematika dengan kota-kota yang sudah menerapkan teknologi informatikadan komunikasi secara maksimal.</p> <p>16. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Pengadaan secara Elektronik.</p> <p>17. Belum terstandarnya layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).</p> <p>18. Belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung terlaksananya tertib penggunaan media informasi dan komunikasi elektronik.</p> <p>19. Belum terpenuhinya sarana prasarana, sumber daya manusia serta software dan hardware Teknologi Informatika (TI) sesuai dengan <i>Masterplan</i> Teknologi Informatika yang telah ada.</p>		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

- 1. Penyediaan infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien diseluruh wilayah Indonesia.**

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan infrastruktur TIK serta ekosistem TIK yang merata di seluruh wilayah adalah :

- a. Penyediaan infrastruktur broadband melalui pembangunan jaringan backbone serat optik palapa ring;
- b. Refarming spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit satelit untuk implementasi broadband 4G di seluruh Kab/kota;
- c. Penyediaan jasa akses layanan telekomunikasi melalui penyediaan pembiayaan KPU/USO;
- d. Mendorong konsolidasi sektor TIK dan penyiaran untuk mencapai efisiensi industri;
- e. Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional;
- f. Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan;
- g. Fasilitasi dalam menciptakan technopreneur Indonesia yang berdaya saing internasional;
- h. Peningkatan kualitas serta kompetensi angkatan kerja sektor TIK;
- i. Pelaksanaan Literasi TIK terhadap anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar;
- j. Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan etransportasi.

2. Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan akses dan kualitas informasi publik yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada masyarakat Indonesia terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah :

- a. Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah;

- b. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;
- c. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
- d. Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia.

3. Mewujudkan Tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif adalah :

- a. Menciptakan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien;
- b. Mewujudkan 9 program Reformasi Birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan kualitas layanan publik, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mengarah dan ikut mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika, meliputi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
- 2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;

3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan;
5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai Perangkat Daerah Provinsi Banten merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya **"Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah"**. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi. Rakyat Banten Sejahtera diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah, yang dalam penafsiran diantaranya dapat artikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kecukupan lahir dan batin masyarakat Banten.

Melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Banten Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh 'Isu Strategis' sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

Persandian Provinsi Banten serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Untuk itu, dalam mengapresiasi upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Provinsi Banten, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Meningkatkan pelayanan perhubungan yang handal, aman, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan;
3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, aman, terjangkau dan ramah lingkungan.

Rumusan kebijakan makro Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten perlu diacu atau setidaknya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra Dinas Informatika dan Komunikasi Kota Tangerang 5 (lima) tahun mendatang.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW Kota Tangerang merupakan penjabaran dari dokumen RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Banten. Dokumen RRW ini hanya berlaku wilayah administratif Kota Tangerang. RTRW Kota Tangerang menjadi acuan bagi pemerintah dalam menerbitkan Izin Prinsip dan Izin Lokasi bagi investor atau masyarakat pengguna ruang. Berkaitan dengan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi, Pasal 19 menyebutkan bahwa sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel;
- b. Arahan pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh kecamatan;

- c. Pengembangan jaringan telekomunikasi sistem kabel sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa jaringan bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang kota;
- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi/*base transceiver station* (BTS) dengan sistem penggunaan menara bersama telekomunikasi untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota; dan
- e. Ketentuan penggunaan frekuensi pemancar radio untuk menjamin kelancaran dan keamanan arus penerbangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika, diatur bahwa Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana pada tahap pertama (2013–2017) diprioritaskan pada pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak; selanjutnya perwujudan struktur ruang pada tahap kedua (2018–2022) diprioritaskan pada : peningkatan jaringan telekomunikasi, meliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan pembangunan telekomunikasi.

Dengan mendasarkan pada arahan rencana tata ruang yang diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang RTRW Kota Tangerang, maka dalam kurun waktu tahun 2019-2023 Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memprioritaskan beberapa pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak, dan peningkatan jaringan telekomunikasi, meliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan pembangunan telekomunikasi. Hal ini perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga pelayanan pada bidang komunikasi dan informasi dapat berjalan secara optimal.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan yang terkait bidang komunikasi dan informatika dan memperhatikan faktor

pendorong dan faktor penghambat pelayanan SKPD berdasarkan hasil-hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi dan komunikasi;
2. Pengelolaan *website* Kota Tangerang sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan pemerintah dengan masyarakat;
3. Bimbingan teknis tata cara penggunaan aplikasi yang sudah terbangun atau dikembangkan;
4. Pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan sarana TIK yang cepat, tepat dan mudah diakses;
5. Integrasi interoperabilitas aplikasi/sistem informasi layanan ASN dan layanan publik berbasis *web*;
6. Optimalisasi sarana prasarana, sumber daya manusia serta *software* dan *hardware* yang sesuai dengan *Masterplan* TIK, standar dan regulasi TIK;
7. Pengelolaan layanan pengaduan dan kegawatdaruratan dengan cepat dan tepat;
8. Pengolahan dan publikasi data statistik daerah Kota Tangerang;
9. Pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dan persandian.

Tabel 3.4
Masalah, Masalah Pokok dan Akar Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterangan
1	Infrastruktur Telematika	Ketersediaan fasilitas publik dengan pelayanan telematika gratis belum optimal	Sarana dan prasarana internet ruang publik belum memadai	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Budaya dan edukasi telematika masyarakat belum memadai (edukasi pemanfaatan telematika/ media sosial online)	Sosialisasi pemanfaatan media online masih belum optimal	Urusan Komunikasi dan Informatika
2	Pelayanan publik administratif	Pendayagunaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal	Belum adanya/ keterbatasan SDM bidang persandian	Urusan persandian
		Ketersediaan dan kualitas data statistik yang terkini belum memadai (keterbatasan kapasitas SDM, pendataan belum optimal)	Belum optimalnya peningkatan data, informasi dan statistik	Urusan statistik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang.

Tujuan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika memerlukan indikator untuk mengukur keberhasilannya. Mengacu pada sasaran kota yang terkait indikator yang ingin dicapai pada akhir kinerja pembangunan yaitu pada tahun 2023.

4.1.2 Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Pada periode tahun 2019-2023, di dalam RPJMD Kota Tangerang Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat tugas untuk menjalankan program utama :

- a. Program Tata Kelaola Pemerintahan;
- b. Program Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian;
- c. Program Pengembangan eGovernment;
- d. Program Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik;

e. Program Statistik dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Untuk lebih jelasnya perumusan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

RENSTRA TAHUN 2019-2023										
URAIAN INDIKATOR				TARGET KINERJA						
TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR		SAT	DATA AWAL 2018	2019	2020	2021	2022	2023
11		12		13	14	15	16	17	18	19
1.3	Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	IKM terhadap pelayanan publik berbasis TIK		Point		82,55	82,6	82,65	82,69	82,74
1.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.1	Persentase Penggunaan Aplikasi	%	6,10	10,05	14,73	22,38	31,44	39,77
		1.2	Persentase pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang digunakan oleh Pemkot Tangerang	%	23	23,49	23,72	23,72	23,72	23,72
		1.3	Persentase pemanfaatan regulasi TIK	%	9	20,93	39,53	60,47	79,07	100
		1.4	Persentase pemanfaatan dan pengamanan infrastruktur TIK	%	25	37,5	50	62,5	75	100
1.3.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan statistik untuk mendukung kebijakan publik	2.1	Persentase data statistik daerah kota	%	18,32	18,37	18,37	18,37	18,37	26,53

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019-2023 ini adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk selanjutnya strategi dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah serangkaian kegiatan perencanaan yang diformulasikan untuk menjawab berbagai permasalahan yang timbul.

Beberapa isu strategis (SWOT) yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang sebagai berikut :

Tabel 5.1
Formulasi strategi SWOT

Kesimpulan analisis Faktor Internal	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
Kesimpulan analisis Faktor eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran (yang cukup) 2. Tersedianya SDM yang cukup memadai bidang IT 3. Tersedianya sarana dan prasarana di Bidang IT yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya tenaga teknis bidang statistik dan persandian 2. Kurang efektifnya pemanfaatan aplikasi OPD yang telah terbangun 3. Rendahnya kualitas monitoring dan evaluasi 4. Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana IT belum efektif dan efisien 5. Belum optimalnya pemberdayaan TIK untuk masyarakat

OPORTUNITIES (O)	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Peraturan Walikota (Kebijakan Walikota tentang IT) 2. Penerapan Elektronik Government 3. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 4. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government 6. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 7. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 8. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana IT (infrastruktur jaringan, database, aplikasi) untuk menerapkan kebijakan Walikota 2. Menerapkan tren positif E – Governmen dan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai anggaran yang tersedia 3. Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif 4. Memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai TUPOKSI organisasi, komitmen dan kepedulian pemimpin 5. Mewujudkan layanan public sesuai kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan komunikasi dan pengawasan terhadap SKPD yang membangun aplikasi sesuai dengan kebijakan walikota dan perundangan yang berlaku 2. Meningkatkan kualitas proses dan output yang dihasilkan oleh integrasi sarana informasi dan database SKPD dengan memanfaatkan tren positif penerapan E – Government dan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 3. Mengembangkan layanan publik yang interaktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat agar seiring dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya informasi 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan dan

	sarana dan prasarana IT yang ada	<p>pemeliharaan sarana dan prasarana IT guna memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>5. Mengoptimalkan pengembangan data center yang memenuhi kebutuhan akan pendayagunaan media informasi dan komunikasi</p> <p>6. Meningkatkan kemampuan untuk memberdayakan potensi (IT) masyarakat guna memenuhi kebutuhan pendayagunaan media informasi dan komunikasi</p>
TREATS (T)	STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas SDM pada OPD di bidang Teknis IT 2. Kurangnya dukungan SKPD terhadap IT (kurang <i>update</i> data) 3. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik 4. Kesenjangan informasi di masyarakat 5. Pesatnya perkembangan TIK 6. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK 7. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata 8. Adanya tuntutan masyarakat untuk layanan publik yang transparan dan lebih baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi tuntutan masyarakat untuk layanan publik yang transparan dan lebih baik dengan anggaran yang tersedia 2. Meningkatkan kualitas SDM bidang IT di OPD sesuai TUPOKSI organisasi yang mendukung pengembangan IT 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aplikasi dan database OPD dengan anggaran yang tersedia 4. Meningkatkan dukungan dan kesadaran OPD terhadap pengembangan IT melalui Sarana dan Prasarana IT yang ada 5. Memenuhi tuntutan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik secara kreatif dan inovatif 6. Mengurangi adanya kesenjangan informasi dalam masyarakat melalui sarana dan prasarana IT yang ada 7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan sarana dan prasarana IT yang tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan komunikasi dan pengawasan terhadap SKPD yang membangun aplikasi untuk meningkatkan dukungan dan kesadaran SKPD terhadap pengembangan IT 2. Mengembangkan layanan publik yang interaktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan public yang transparan dan lebih baik 3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan dan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IT guna memenuhi tuntutan dan dampak globalisasi informasi akan keterbukaan informasi publik 4. Mengoptimalkan pengembangan data center yang memenuhi kebutuhan kedepan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang transparan dan lebih baik 5. Menyiapkan dan menyediakan payung hukum yang memperkuat setiap kebijakan IT di daerah termasuk pemenuhan tuntutan transparansi layanan publik, peningkatan kualitas SDM bidang IT di OPD dan peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat 6. Meningkatkan kemampuan untuk memberdayakan potensi (IT) masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat.

Dari analisis terhadap faktor internal dan eksternal serta memperhatikan sasaran kota, strategi dan arah kebijakan kota, maka didapatkan sejumlah rumusan strategi sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlaqul Karimah dan Berdaya Saing”			
Misi 1 : “Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi; 2. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota	1. Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif; 2. Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program pembangunan kota; 3. Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan statistik untuk mendukung kebijakan publik	Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik	1. Penerbitan regulasi terkait TIK dalam rangka mendukung kebijakan publik; 2. Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang untuk periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah;
 - d. Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah;
 - e. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah;
2. Program Saran dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian, dengan kegiatan :
 - a. Infrastruktur Internet dan Data Center;
 - b. Tatakelola TIK;
 - c. Keamanan Informasi dan Persandian
3. Program Statistik dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan kegiatan :
 - b. Survey dan Akuisisi Data;
 - c. Pengolahan dan Publikasi Data dan Statistik;
 - d. Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Program Pengembangan eGovernment, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Manajemen Pemerintahan;
 - b. Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Layanan Publik;
 - c. Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi;
 - d. Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
5. Program Pengembangan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan :
 - a. Diseminasi Informasi Media Elektronik;
 - b. Diseminasi Informasi Media Cetak
 - c. Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik;

d. Pengelola Ruang Kendali Kota.

Secara rinci, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang untuk periode 2019-2023 dapat dilihat pada lampiran tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang periode Tahun 2019-2023

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	(2019 SD 2023)		
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)																
		1	IKM terhadap pelayanan publik berbasis TIK	point	-	82,55		82,6		82,65		82,69		82,74		82,77	
1.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)																
		1	Persentase Penggunaan Aplikasi	%	6,1	10,05		14,73		22,38		31,44		39,77		39,78	
		3	Persentase pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang digunakan oleh Pemkot Tangerang	%	23	23,49		23,72		23,72		23,72		23,72		100	
		4	Persentase pemanfaatan regulasi TIK	%	9	20,93		39,53		60,47		79,07		100		100	
		5	Persentase pemanfaatan dan pengamanan infrastruktur TIK	%	25	37,5		50		62,5		75		100		100	

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
1.3.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan statistik untuk mendukung kebijakan publik																
		1	Persentase data statistik daerah kota	%	100	18,37		18,37		18,37		18,37		26,53		100	
1.2.10	Komunikasi dan Informatika																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.1 0.01	Program Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian					3.918.031.104		4.916.615.500		4.310.425.316		4.783.112.816		5.212.014.816		23.140.199.552	
		1	Persentase pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	20	24,65		46,05		67,44		88,37		100		100	
		2	Persentase Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	%	14	20		40		60		80		100		100	
1.02.1 0.01.0 1	Infrastruktur Internet dan Data Center					2.863.268.604		3.639.895.000		3.342.674.816		3.674.174.816		4.081.174.816			
		1	Jumlah sarana dan prasarana Ruang Server (Data Center)	paket		5		5		5		5		5			
		2	Jumlah bandwidth utama dan backup Ruang Server (Data Center)	MBPS		200 (Utama dan Backup)		200 (Utama dan Backup)		300 (Utama dan Backup)		300 (Utama dan Backup)		300 (Utama dan Backup)			
		3	Jumlah Jaringan LAN WAN yang terpelihara di	OPD		8		9		10		10		10			

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		setiap OPD															
		4 Jumlah akses internet pada ruang publik	Titik		40		80		12		160		180				
1.02.1 0.01.0 2	Tatakelola TIK					605.000.000		705.542.500		370.387.500		451.350.000		451.350.000			
		1 Jumlah Dokumen Tata Kelola TIK dan Layanan Tata Kelola TIK	SOP		10		10		10		10		10				
		2 Jumlah Dokumen SMPI, Sertifikasi ISO 27001, dan Master Plan TIK	Dokumen		1 (susun dokumen SMPI)		2 (susun dokumen Master Plan TIK dan Review Dokumen SMPI)		2 (Review dokumen Master Plan TIK dan Review Dokumen SMPI)		2 (Perpangnjang Sertifikasi SMPI dan Review Dokumen Master Plan TIK)		2 (Review Dokumen Master Plan TIK dan Review Dokumen SMPI)				
		3 Terselenggaranya Forum Detikda	kegiatan		0		3		3		4		4				
1.02.1 0.010 3.	Keamanan Informasi dan Persandian					449.762.500		571.178.000		597.363.000		657.588.000		679.490.000			
		1 Jumlah keamanan persandian pada sistem elektronik milik Pemerintah Kota Tangerang	sistem elektronik		14		14		14		14		14				
		2 Jumlah bimbingan teknis bagi aparatur/tenaga keamanan informasi	orang		120		120		120		120		120				
1.02.1 0.02	Program Pengembangan eGovernment					5.840.794.000		5.853.840.500		6.288.590.850		6.725.590.850		7.222.340.850		31.931.157.050	

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		1	Persentase Pengembangan, Integrasi dan Layanan eGovernment	%	20	19,53		19,92		19,92		20,31		20,31		100	
		2	Persentase Pengembangan, Integrasi Aplikasi Layanan Publik	%	20	20		26		10		10		10		76	
1.02.1 0.02.0 1	Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Manajemen Pemerintahan					3.230.000.000		3.578.172.850		3.918.172.850		4.309.172.850		4.784.172.850			
		1	Jumlah aplikasi egovernment yang dikembangkan	aplikasi		40		11		41		42		42			
		2	Jumlah aplikasi egovernment yang terintegrasi	aplikasi		10		10		10		10		10			
1.02.1 0.02.0 2	Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Layanan Publik					984.000.000		1.367.000.000		1.374.000.000		1.360.000.000		1.363.500.000			
		1	Jumlah aplikasi layanan publik yang dikembangkan dan terintegrasi	modul/a plikasi		13		26		10		10		10			
1.02.1 0.02.0 3	Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi					1.110.167.000		463.600.000		538.600.000		581.600.000		629.600.000			
		1	Jumlah Pengguna Aplikasi (ASN/TKK/THL/RT/RW) eGovernment	orang		1250		1250		1250		1250		1250			
		2	Jumlah Aplikasi Layanan	modul/a plikasi		108		134		144		154		164			

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		publik yang terpelihara															
1.02.1 0.02.0 4	Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				516.627.000		445.067.650		457.818.000		474.818.000		445.068.000				
		1 Jumlah pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik	orang		300		300		300		300		300				
		2 Jumlah Dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terstandarisasi	dokumen/laporan		20		20		20		20		20				
		3 Jumlah Peserta peserta Fasilitas Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Rapat Koordinasi SPSE	orang		500		500		500		500		500				
1.02.1 0.03	Program Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik				9.476.133.000		9.033.150.000		10.430.415.300		10.862.815.300		11.158.320.300		50.960.833.900		
		1 Persentase Pengembangan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	%	20	20		20		20		20		20		100		
		2 Presentase Konten saluran media informasi sesuai	%	20	20		20		20		20		20		100		

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		kebutuhan															
		3 Presentase informasi yang terpublikasi	%	20	20,06		20,07		20,08		20,09		20,09		100		
		4 Presentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif	%	0	7,69		23,08		38,46		53,85		69,23		69,23		
1.02.1 0.03.0 1	Diseminasi Informasi Media Elektronik					1.817.670.000		2.225.980.000		2.443.230.000		2.696.230.000		2.716.230.000			
		1 Jumlah Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media Elektronik (TV Lokal/Regional, Nasional)	paket		67		93		95		99		102				
		2 Jumlah liputan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui dokumentasi audio visual	video		105		105		105		115		120				
		3 Jumlah berita/informasi pemerintah daerah yang terpublikasi melalui website	berita/liputan		450		1.065		1.080		1.200		1.300				
		4 Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	stel		30		45		45		45		45				
1.02.1 0.030 4.	Pengelola Ruang Kendali Kota					2.677.948.000		1.922.955.000		2.665.960.300		2.687.210.300		2.729.710.300			

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		1	Jumlah layanan pengaduan masyarakat melalui LAKSA dan Kegawatdaruratan	pengaduan/aspirasi		5750		5850		5950		6000		6050			
1.02.1 0.03.0 2	Diseminasi Informasi Media Cetak					4.099.480.000		4.252.300.000		4.629.140.000		4.629.140.000		4.834.640.000			
		1	Jumlah Publikasi Informasi Program Pemkot Kepada Masyarakat Kota Tangerang melalui media cetak Internal	eksemplar		1.525.800		1.445.800		1.497.500		1.497.500		1.577.500			
		2	Jumlah Desiminasi Informasi Pemerintah Daerah Melalui, Backdrop, Baligho, Spanduk	m2		1044		8.192		10.732		10.732		10.732			
		3	Jumlah Desiminasi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Kalender Meja, Leaflet, & Balon Udara	buah/pcs		12.006		12.006		12.006		12.006		12.006			
		4	Jumlah Penayangan Advetorial pada Media Cetak	paket		5		5		5		5		5			
1.02.1 0.03.0 3	Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik					881.035.000		631.915.000		692.085.000		850.235.000		877.740.000			
		1	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan	keg/org		14, 690		10, 500		10, 500		10, 500		10, 500			

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUB JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		Kelompok Informasi Masyarakat															
		2 Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi daerah	kegiatan		8		8		8		8		8				
1.02.1 0.04	Program Statistik dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi				1.532.700.000		1.468.932.100		1.614.827.250		1.795.461.100		1.954.148.800		8.366.069.250		
		1 Persentase Layanan Statistik Daerah/Sektoral	%	18	18,92		18,92		18,92		18,92		24,32		100		
		2 Presentase peningkatan pemahaman TIK	%	0	59,58		59,58		59,58		59,58		58,56		60		
1.02.1 0.04.0 1	Survey dan Akuisisi Data				602.135.000		310.845.000		341.445.000		375.445.000		412.845.000				
		1 Jumlah data dan statistik dalam bentuk tabular dan/atau spasial	survey		4		4		4		4		4				
		2 Jumlah statistik survey layanan publik	jenis data		1		1		1		1		1				
1.02.1 0.04.0 2	Pengolahan dan Publikasi Data dan Statistik				311.700.000		456.400.000		551.135.600		604.465.600		641.865.600				
		1 Jumlah data statistik Sektoral lainnya	dokumen		9		9		9		9		9				
1.02.1 0.04.0 3	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi				618.865.000		701.687.100		722.246.650		815.550.500		899.438.200				
		1 Jumlah peserta TOT pemanfaatan TIK	orang		1.000		2.400		2.400		2.400		3.330				

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		2	Jumlah peserta Bimtek/Workshop Regulasi TIK/Detikda	orang		100		100		100		100		100			
4.01.	Non Urusan																
0.00.0 0.01	Program Tata Kelola Pemerintahan					5.193.932.500		5.259.150.018		5.074.797.326		4.973.234.453		4.979.050.573		25.480.164.870	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	%	100	100		100		100		100		100			
		2	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	%	100	100		100		100		100		100			
		3	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	%	100	100		100		100		100		100			
		4	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	%	100	100		100		0		0		100		100	
		5	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	
		6	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	0		100		100		100		100		100	

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		perangkat daerah															
		7 Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		8 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		9 Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
0.00.0 0.01.0 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.925.006.500	3.938.358.000	4.315.960.750	4.327.386.750	4.327.617.750								
		1 Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang handal untuk mendukung kegiatan dinas	line/inter net		4	4	4	4	4	4	4	4	4				
		10 Jumlah jasa (tenaga) teknis/administrasi perkantoran yang disediakan	org		31	31	31	31	31	31	31	31	31				
		11 Jumlah penyediaan jasa pengamanan kantor yang handal untuk keperluan	org / stel		4, 4	4, 4	4, 4	4, 4	4, 4	4, 4	4, 4	4, 4	4, 4				

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		dinas, jumlah pakaian kerja															
		12 Jumlah dokumen standar operasional prosedur (SOP) PD yang disusun	jenis		47		47		47		47		47				
		13 Jumlah dokumen pengelolaan PPID SKPD	laporan		4		4		4		4		4				
		2 Jumlah jasa pemeliharaa n kendaraan dinas/operas ional yang disediakan	unit		8 mobil, 20 motor		8 mobil, 20 motor		8 mobil, 20 motor		8 mobil, 20 motor		8 mobil, 20 motor				
		3 Jumlah jasa (tenaga) kebersihan kantor yang disediakan	HOK, barang		4 HOK, 17 Jenis Barang		4 HOK, 17 Jenis Barang		4 HOK, 17 Jenis Barang		4 HOK, 17 Jenis Barang		4 HOK, 17 Jenis Barang				
		4 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	jenis/lem bar		67, 41		67, 41		67, 41		67, 41		67, 41				
		5 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis		10		10		10		10		10				
		6 Jumlah komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan	jenis barang		8		8		8		8		8				
		7 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	surat kabar		5		5		5		5		5				
		8 Jumlah makanan	buah		11593		11593		11593		11593		11593				

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		dan minuman kantor yang disediakan															
		Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diselenggarakan	ok		351		351		351		351		351				
0.00.0 0.01.0 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.243.000.000		1.221.945.318		701.313.576		585.182.703		587.311.823				
		Jumlah kendaraan dinas /operasional kantor yang terpelihara	unit		9 mobil, 20 motor		9 mobil, 20 motor		9 mobil, 20 motor		9 mobil, 20 motor		9 mobil, 20 motor				
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara rutin/berkala	unit		129		129		129		129		129				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	jenis		2		4		3		2		2				
		Jumlah rehabilitasi gedung kantor	paket		1		2		0		1		0				
		jumlah pengadaan kendaraan dinas	unit		0		0		2 mobil, 10 motor		0		0				
0.00.0 0.01.0 3	Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah				25.926.000		98.846.700		57.523.000		60.665.000		64.121.000				
		Jumlah pakaian kerja lapangan	stel/jenis		86		86		86		86		86				

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUW JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGE T	Rp.	TARGET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
		yang diadakan															
		2 Jumlah aparaturn yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	ok		0		9		9		9		9				
0.00.0 0.01.0 4	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0				
		1 Banyaknya laporan realisasi keuangan semesteran	dokumen		2		2		2		2		2				
		2 Banyaknya laporan realisasi keuangan akhir tahun	dokumen		1		1		1		1		1				
		3 Banyaknya laporan prognosis realisasi anggaran	dokumen		1		1		1		1		1				
0.00.0 0.01.0 5	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0				
		1 Jumlah dokumen Renstra PD dan Renstra PD Perubahan yang disusun	dokumen		2		0		0		0		1				
		2 Jumlah dokumen Renja PD dan Renja PD Perubahan yang disusun	dokumen		2		2		2		2		2				
		3 Jumlah dokumen Rencana Kegiatan Anggaran	jenis		53		17		17		17		17				

Kode	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	DATA AWAL TAHUN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERAN GKAT DAERA H (PD) PENAN GGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		(RKA) PD dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) PD Perubahan yang disusun															
		4 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Perubahan yang disusun	jenis		53		17		17		17		17				
		5 Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) PD yang disusun	dokumen		2		2		2		2		2				
		6 Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD yang disusun	laporan		4		4		4		4		4				
		7 Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) PD yang disusun	dokumen		1		1		1		1		1				
		8 Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat PD yang disusun	laporan		1		1		1		1		1				
					25.961.590.604		26.531.688.118		27.719.056.042		29.140.214.519		30.525.875.339		139.878.424.622		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Keberhasilan tujuan dan sasaran dari instansi yang telah selaras dengan RPJMD kota akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran kota.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing bidang berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran SKPD, yaitu Sekretariat, Bidang Pengembangan Aplikasi Manajemen Pemerintahan, Bidang Pengembangan Aplikasi Layanan Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Desiminasi Komunikasi dan Informasi Publik. Tiap bidang berkontribusi pada pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Terwujudnya pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), dan indikator tujuan yaitu Tingkat kepuasan penyelenggaraan TIK dalam pelayanan publik administratif. Tujuan dan indikator tersebut berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran kota pada RPJMD Kota Tangerang. Semua bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran dalam terwujudnya Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas dan secara langsung juga berkontribusi terwujudnya Misi Kota Tangerang yang Ke-1, yaitu “Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas”. Gambaran tentang indikator tujuan dapat dilihat pada lampiran tabel 7.1.

Tabel 7.1
Gambaran tentang indikator tujuan

NO	RPJMD TAHUN 2019-2023										RENSTRA TAHUN 2019-2023										
	URAIAN INDIKATOR			TARGET KINERJA							URAIAN INDIKATOR			TARGET KINERJA							
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SAT	DATA AWAL 2018	2019	2020	2021	2022	2023		TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SAT	DATA AWAL 2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1.3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	57,49	60	62	65	67	69												
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik	1.1	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	B	B	BB	BB	BB	BB	1.3	Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	IKM terhadap pelayanan publik berbasis TIK	Point	82,55	82,6	82,65	82,69	82,74		
		1.2	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.1	Persentase Penggunaan Aplikasi	%	6,10	10,05	14,73	22,38	31,44	39,77
		1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	Point	82,54	82,60	82,64	82,68	82,70	82,74			1.2	Persentase pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang digunakan oleh Pemkot Tangerang	%	23	23,49	23,72	23,72	23,72	23,72
												1.3	Persentase pemanfaatan regulasi TIK	%	9	20,93	39,53	60,47	79,07	100	
												1.4	Persentase pemanfaatan dan pengamanan infrastruktur TIK	%	25	37,5	50	62,5	75	100	
										1.3.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data dan statistik untuk mendukung kebijakan publik	2.1	Persentase data statistik daerah kota	%	18,32	18,37	18,37	18,37	18,37	26,53	

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra OPD Tahun 2019-2023 merupakan rencana tindaklanjut yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023, merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan serta sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Tahun 2019-2023 yang berkedudukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kota Tangerang. Oleh karena itu, dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebegus apapun isi dari Renstra dan perubahannya tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misi kota tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menerapkannya.

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan kekuatan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang tahun 2019-2023 ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat Kota Tangerang informatif, mandiri dan beretika melalui Komunikasi dan Informatika.